



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI GORONTALO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BONE
BOLANGO**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 27 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Gorontalo
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bone Bolango

PEMOHON

- Tonny S. Junus dan Daryatno Gobel (48/PHP.BUP-XIX/2021)
- Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim (52/PHP.BUP-XIX/2021)
- Rustam Akili dan Dicky Gobel (56/PHP.BUP-XIX/2021)
- Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi (63/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Gorontalo
- KPU Kabupaten Bone Bolango

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Januari 2021, Pukul 08.16 – 09.55 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Haifa Arief Lubis
Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Tonny S. Junus
2. Daryatno Gobel

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ridwan Darmawan
2. Rauf Abdul Azis

C. Termohon Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021:

Kadir Mertosono

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021:

Nasrullah

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Samsudin
2. Febriyan Potale
3. Samsul Huda
4. Totok Prasetyanto

F. Bawaslu Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Wahyudin Akili
2. Alexander Kaaba

G. Pemohon Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021:

Rusliyanto Monoarfa

H. Termohon Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Adnan A. Berahim
2. Sutenty Lamuhu
3. Humairoh U. Tipuwo

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021:

Yakop Abdul Rahmat Mahmud

J. Pihak Terkait Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021:

Abdul Hanap

K. Bawaslu Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021:

Moh. Fahri Kaluku

L. Pemohon Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rustam Akili
2. Dicky Gobel

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Duke Arie Widagdo
2. Salahudin Pakaya
3. Aan Sukirman
4. Aryoadi Pramono
5. Dhimas Pradana
6. Ferdinansyah Nur
7. Habloel Mawadi
8. Muhammad Arief Irawan
9. Susanto Kadir

N. Termohon Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021:

Rasid H. Sayiu

O. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021:

La Said Sabiq

P. Pihak Terkait Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dorel Almir
2. Mohamad Rivky Mohi
3. Samsul Huda
4. Totok Prasetyanto
5. Saipul Rahman
6. Erik Anugra

Q. Bawaslu Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Wahyudin Akili
2. Alexander Kaaba

R. Pemohon Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

Syamsir Djafar Kiayi

S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

Frengki Uloli

T. Termohon Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

Syahbudin Bau

U. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

Rio Suwarno Ade A. Pala

V. Pihak Terkait Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

Abdul Hanap

W. Bawaslu Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

Moh. Fahri Kaluku

X. Bawaslu Provinsi Gorontalo:

Rahmad Katon Mohi

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.16 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum saya memulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, persidangan Mahkamah ini dimulai dari masuk sampai di dalam ruang persidangan, baik fisik orangnya maupun berkasnya, kita lakukan secara ketat, disiplin protokol kesehatan. Sehingga untuk orangnya, harus ada surat antigen yang negatif, tidak terpapar Covid-19.

Saudara, untuk lain kali kalau mau hadir boleh menggunakan surat yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang kalau itu adalah hasil antigen yang negatif, tapi hanya berlaku dua hari saja. Bisa masuk di sini, nanti dicek, hanya berlaku dua hari. Tapi kalau Saudara tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai surat itu, Anda di sini harus diantigen lebih dahulu. Sehingga diharapkan kedatangannya mengingat waktu, sehingga tidak menyebabkan terlambat persidangan dimulai.

Pada persidangan kali ini, mestinya pukul 08.00 WIB persis harus kita mulai. Tapi karena memenuhi protokol kesehatan, banyak yang datangnya terlambat, sehingga mundur sampai 15 menit tadi, ya. Untuk persidangan yang akan datang, diharapkan kita disiplin mengenai waktu, sehingga kita bisa tepat waktu.

Karena kita memenuhi protokol kesehatan, maka pertemuan di dalam ruang persidangan ini juga ada batasan waktu yang sangat ketat sesuai dengan protokol kesehatan. Kita tidak boleh berlama-lama di dalam satu ruangan yang sama meskipun kita sudah pakai masker, kita semuanya sudah sehat ... dinyatakan sehat. Tapi, klaster penularan Covid itu yang paling rawan. Salah satunya, di dalam ruang yang sama, dengan ventilasi yang tidak terbuka, tapi melalui AC ini bisa terpapar Covid-19. Oleh karena itu, persidangan ini waktunya juga sangat dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan, ya.

Jadi, ada dua hal yang harus kita ikuti, protokol mengenai persidangan Mahkamah dan protokol kesehatan, ya. Untuk itu untuk menjadi perhatian kita bersama.

Baik, kita mulai. Pada persidangan pertama kita akan mendengarkan keterangan atau pengajuan Permohonan yang dilakukan

oleh Para Pemohon. Untuk KPU, Bawaslu, dan Calon Pihak Terkait, pada kesempatan ini masih tidak boleh merespons, tidak boleh berbicara, tapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Para Pemohon untuk kita dengarkan bersama.

Kepada Para Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, juga sudah disampaikan Permohonan Para Pemohon ini secara tertulis, sehingga sebetulnya sudah tahu, apa isi Permohonan itu. Permohonan yang dikirim adalah Permohonan awal. Kalau ada Perbaikan Permohonan, juga disertakan Perbaikan Permohonan. Sesuai dengan hukum acara Mahkamah, Permohonan awal harus memenuhi tenggang waktu 3x24 jam sejak ditetapkan dan diumumkan oleh KPU hasil penghitungan suara.

Kemudian, kalau memenuhi syarat itu, Pemohon bisa mengajukan perbaikan yang jangka waktunya, tenggang waktunya juga 3x24 jam. Dalam 3x24 jam, hanya diperkenankan untuk satu kali mengadakan atau melakukan perubahan. Kalau ada yang mengubah sampai dua atau tiga kali, yang dipakai adalah perubahan yang pertama. Jadi, file satunya, ya perubahan yang pertama.

Dalam perubahan yang pertama itu diperkenankan untuk mengubah substansi Permohonan, menyangkut substansi. Pada kesempatan sidang ini, Para Pemohon nanti juga keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan keterangan anu, masih boleh melakukan perubahan hanya menyangkut masalah typo-nya saja, ya, tidak boleh ... sudah tidak boleh mengubah substansinya. Oleh karena itu, nanti pada waktu menyampaikan, ini yang akan disampaikan oleh Pemohon itu Permohonan yang mana, nanti akan kita nilai dan juga akan mendapat respons dari Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Sebelum dimulai, masih ada yang mau masuk, silakan! Lain kali supaya tepat waktu, sehingga proses antigennya juga didapat lakukan sebelum waktunya, ya? Ini kalau begini, mengganggu jalannya revolusi ini, ya. Masih anu ... ini terutama KPU-KPU ini yang terlambat ini, ya. Lain kali untuk perhatian, jangan sampai terlambat. Kalau antigen juga harus datang lebih awal, ya? Nanti kalau yang berikutnya sudah dilakukan aturan maksimal keterlambatan adalah 5 menit. Kalau tidak datang 5 menit atau sebelum ... lewat dari 5 menit, maka sudah tidak diperkenankan lagi untuk hadir di dalam persidangan, ya?

Baik, kita mulai dulu dengan Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021. Yang disampaikan adalah pokok-pokoknya karena secara tertulis semuanya sudah dapat dokumennya. Menyangkut identitas, ya, itu terutama, identitasnya dulu. Kemudian, nanti dalil-dalil yang dimohonkan. Tapi tidak dibacakan, tapi disampaikan pokok-pokoknya saja. Misalnya, ada pihak-pihak yang menggerakkan ASN. Nanti saya minta untuk perkenalan sebelumnya, ya.

Kemudian yang kedua, misalnya, ada money politics, itu saja, di mana, di mana. Sudah gitu aja, jangan menjelaskan secara panjang

lebar karena itu sudah dilakukan ... apa ... penjelasannya di dalam narasi yang tertulis dalam Permohonannya.

Baik, sebelum kita mulai, ada siapa yang hadir? Akan kita lihat bersama dan direkam dalam risalah persidangan. Pemohon dulu pada Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir? Saya persilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Kuasa Pemohon, Ridwan Darmawan. Dan di belakang saya, ada Pak Rauf Abdul Azis, S.H. dan secara daring sesuai dengan yang sudah disampaikan di dalam surat 1 hari sebelum persidangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Secara daring ada hadir Prinsipal, termasuk, ya? Baik. Ini untuk Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Gorontalo.

Kemudian, Pemohon Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir? Saya persilakan!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumssalam wr. wb.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Nama saya Dr. Rusliyanto Monoarfa sebagai Calon Bupati.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prinsipal, ya?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Prinsipal.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sendiri, Pak Dr. Rusli?

10. PEMOHON 52: RUSLIYANTO MONOARFA

Bersama pendamping, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pendamping?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Satu orang.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi karena pendamping, itu tidak punya hak. Duduk yang di belakang itu, ya?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tangan kanan, Mas, yang dipakai, Mas! Indonesia, timur, jadi tidak boleh tangan kiri, ya. Kalau itu di negara antah-berantah, mau tangan kiri saya persilakan.

Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir saya, Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H. Kemudian, di belakang saya Salahudin Pakaya, S.H. Kemudian, secara daring ada 9 orang. Prinsipal, Dr. H. Rustam Akili sebagai Pemohon. Kemudian Dicky Gobel, S.E., sebagai Pemohon. Aan Sukirman, S.H. (Kuasa Hukum), Aryoadi Pramono, S.H. (Kuasa Hukum), Dhimas Pradana, S.H. (Kuasa Hukum), Ferdinansyah Nur, S.H. (Kuasa Hukum), Habloel Mawadi, S.H. (Kuasa Hukum), Muh. Arif Irawan, S.H.,

M.H, C.L.A (Kuasa Hukum), dan Susanto Kadir, S.H., C.P.L (Kuasa Hukum).

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Terakhir, Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Kabupaten Bone Bolango, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir Kuasa Hukum, Frengki Uloli dan Prinsipal, Syamsir Djafar Kiayi.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di belakang itu, Pak?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terima kasih.

Yang hadir secara daring, enggak ada?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Tidak ada, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik kalau begitu. Untuk Para Pihak yang hadir secara daring, bisa mendengar suara di persidangan ini? Klir, ya? Enggak ada masalah, ya?

Baik, sekarang Termohon. Termohon Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021, hadir saya Kuasa Hukum, Nasrullah, dan dari Anggota KPU Kabupaten Gorontalo, Pak Kadir Mertosono, S.Pdi. terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Termohon Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021?

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankan, kami dari Termohon Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021. Saya sendiri, Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H. Kemudian, saat ini kita didampingi oleh Prinsipal langsung, Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango Pak Adnan Berahim. Secara daring juga, Yang Mulia, ada 2 orang dari Prinsipal kami, yaitu Ibu Sutenty Lamuhu dan Ibu Humairoh U. Tipuwo.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Termohon Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 tidak jadi satu, ini ada lagi? Untuk Perkara yang Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 ini? Ini kan, sebetulnya KPU-nya Kabupaten Gorontalo sama, kan, sebetulnya? Enggak, maksud saya, KPU-nya sama, kan, sebetulnya Kabupaten Gorontalo?

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: LA SAID SABIQ

Ya, sama. Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi sendiri-sendiri?

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: LA SAID SABIQ

Ya, ada 2 Kuasa Hukum (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh (...)

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: LA SAID SABIQ

Sebetulnya (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lebih ... anu ... lebih sederhana, untuk perkara yang menangani siapa, itu bisa terserah. Tapi yang hadir di sini supaya lebih efisien, kan menyangkut masalah protokol kesehatan, jangan sampai banyak yang hadir, bisa di ... anu ... sebetulnya ... ini dipisah-pisah sebetulnya, ya. Ya, sudah ... sudah terlanjur. Tapi nanti ... besok pada waktu ... anu ... bisa begini. Kuasa Hukumnya saja 2 orang, ya. Prinsipalnya 1 yang hadir, kan sama saja itu. Ya, kan? Ya, ini. Tapi, ya, biar bisa lihat Monas kok, ya? Enggak masalah.

Silakan, Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021!

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: LA SAID SABIQ

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya, atas nama La Said Sabiq, S.H. ditemani ... didampingi oleh salah satu Komisioner dari KPU Gorontalo, Pak Rasid H. Sayiu.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 juga sama, ya? Sendiri? Oke. Untuk Kabupaten Bone Bolango juga sendiri, untuk yang Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021?

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: RIO SUWARNO ADE A. PALA

Sendiri, Yang Mulia. Nomor perkaranya yang berbeda.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan, siapa?

38. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: RIO SUWARNO ADE A. PALA

Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Rio Suwarno Ade A. Pala, Kuasa Hukum dari Termohon Nomor Perkara 63/PHP.BUP-XIX/2021. Saya juga bersama dengan Prinsipal, Bapak Syahbudin Bau, salah satu Anggota Komisioner KPU Kabupaten Bone Bolango. Ada juga 2 orang via Zoom ... via daring, yang sementara online juga, Yang Mulia.

Terima kasih.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Bawaslu. Ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo jadi satu ini. Silakan, Bawaslu Gorontalo!

40. BAWASLU PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: WAHYUDIN AKILI

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, kami dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021. Saya Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wahyudin Akili. Di belakang saya, Pak Alexander Kaaba sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini di catatan kami ada yang dari Bawaslu Provinsi. Ada yang hadir?

42. BAWASLU PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: WAHYUDIN AKILI

Via daring, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, via daring.

44. BAWASLU PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: WAHYUDIN AKILI

Tiga orang.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih.
Kemudian, Bawaslu dari Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021, Bupati Kabupaten Bone Bolango. Siapa yang hadir?

46. BAWASLU PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. FAHRI KALUKU

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Saya sendiri, Pak, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Mohammad Fahri Kaluku dengan Nomor Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021, dan didampingi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo.
Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 jadi satu, ya, ini, ya?

48. BAWASLU PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. FAHRI KALUKU

Ya, siap, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Didampingi oleh (...)

50. BAWASLU PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. FAHRI KALUKU

Bawaslu Provinsi.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu Provinsi? Yang hadir di sini?

52. BAWASLU PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. FAHRI KALUKU

Ya.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini Pak siapa ini? Pak Jaharudin atau Pak Moh. Zain? Silakan!

54. BAWASLU: RAHMAD KATON MOHI (PROVINSI GORONTALO)

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Rahmad Mohi, Pak Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak siapa?

56. BAWASLU: RAHMAD KATON MOHI (PROVINSI GORONTALO)

Rahmad Mohi dari Anggota Bawaslu Provinsi mendampingi (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini namanya agak sudah. Nanti disesuaikan, Pak Wir.
Baik. Kemudian, Calon Pihak Terkait. Pertama, Calon Pihak Terkait
Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: SAMSUDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir Calon Kuasa Pihak Terkait, saya Samsudin sama Febriyan
Potale. Yang daring, Samsul Huda sama Totok Prasetyanto, Yang Mulia.
Terima kasih.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021. Calon
Pihak Terkait, siapa yang hadir?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HANAP

Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HANAP

Perkenalkan, nama saya Abdul Hanap, S.H., M.H. Kami dari Pihak Terkait. Untuk saat ini yang hadir di ruangan ini, saya sendiri dan yang via Zoom belum ada.

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Calon Pihak Terkait Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DOREL ALMIR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Hadir untuk Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021, tim ... apa ... Kuasa Hukum Dorel Almir dan Mohamad Rivky Mohi. Kemudian, hadir dalam daring Samsul Huda, Totok Prasetyanto, Saipul Rahman, Erik ... Erik Anugra. Kita mewakili Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto, S.T., Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi yang Pihak Terkait Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 juga yang diwakili sama, kan?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DOREL ALMIR

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sama dalam perkara yang berbeda, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ditangani sendiri-sendiri?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DOREL ALMIR

Ya, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Tapi ditetapkan nanti hanya 1, kan, yang ditetapkan. Itu, kan, Permohonannya 1, ya, Pak? Ya, kan? Yang mengajukan Permohonan, kan Pihak Prinsipal, kan 1 atau ada 2? Oh, oke.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DOREL ALMIR

2, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada 2?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DOREL ALMIR

2, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Keluar banyak itu.
Kemudian, Calon Pihak Terkait 63/PHP.BUP-XIX/2021.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HANAP

Terima kasih, Yang Mulia. Sama, Pak.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Abdul Hanap, ya?

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HANAP

Ya, Abdul Hanap.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Begini, untuk Pihak Terkait, jadi ini nanti setelah persidangan mau selesai ... hampir selesai, Saudara baru ditetapkan untuk menjadi Pihak Terkait. Sehingga dalam hukum acara, Anda sekarang ini belum secara resmi menjadi Pihak Terkait, jadi masih calon. Karena kita belum

tahu, apa betul dapat diduga Anda nanti jadi Pihak Terkait atau tidak. Kalau Permohonannya ternyata salah, kan enggak usah jadi Pihak Terkait, kan gitu? Makanya masih calon, undangannya juga masih calon, kan? Nah, nanti setelah ditetapkan, Anda boleh ... pada persidangan yang akan datang boleh duduk di depan sini. Itu hukum acaranya begitu, ya, bisa dimengerti, kenapa kok sekarang masih ada di sana?

Ya, baik. Kalau begitu, sekarang kita mulai yang pertama, waktunya supaya bisa kita jaga secara disiplin, jangan bertele-tele yang disampaikan. Karena kita semua sudah membaca dan sudah ... bahkan Hakim itu sudah menganalisis, ini Permohonan Anda itu sudah dianalisis oleh kita begini. Jadi, enggak usah bertele-tele, ya? Sampaikan identitas, dalil-dalilnya, dan Petitumnya yang pokok saja.

Baik, silakan!

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Identitas Pemohon atau hal ... apa ... Permohonannya adalah Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 750 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perselisihan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah. Yang bertanda tangan di bawah ini, H. Tonny Junus, alamat tidak perlu dibacakan.

Haji ... yang kedua, nama, H. Daryatno Gobel, memberi kuasa tertanggal 17 Desember 2020 kepada Aroman Bobihoe dan kawan-kawan, dalam hal ini sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

Yang pertama. Kewenangan Mahkamah (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan Kewenangan Mahkamah, ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Dianggap dibacakan. Kedudukan Hukum Pemohon.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Bahwa berdasarkan PMK Nomor 6 Tahun 2020, dianggap dibacakan.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Dan berdasarkan (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Calon ... calon nomor urut berapa itu, Pemohon?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Nomor Urut 1.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 1? Baik.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Ya. Bahwa hasil keputusan KPU terkait rekomendasi Bawaslu, dalam hal ini bahwa meski selisih antara Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Pihak Calon Pihak Terkait itu di luar sebagaimana ketentuan Pasal 158. Tetapi karena ada persoalan yang

substansial, maka kami beranggapan punya kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan a quo.

Tenggat waktu pengajuan Permohonan. Bahwa Keputusan KPU Gorontalo Nomor 750 dan seterusnya, diumumkan atau dikeluarkan pada tanggal 16 Desember dan diumumkan pada hari yang sama, pukul 22.38 WITA.

Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan pada Mahkamah Konstitusi pada pukul 22.38 WITA.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hari jumat, tanggal 18?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Tanggal 18, pukul 20.22 [*Sic!*]WITA.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Nah, pokok Permohonan (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus ... anu ... tanggal Perbaikan Permohonan. Anda mengajukan perbaikan, enggak?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Perbaikan.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang yang dibaca perbaikannya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Perbaikannya, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikannya kapan masuk ke Kepaniteraan?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Tanggal 18 (...)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

3 hari?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

3 hari setelah (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pengajuan Permohonan?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Pengajuan Permohonan, pukul 22.00 WITA, hari Jumat itu, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, hari Selasa, tanggal 22 Desember, betul, ya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikannya, ya? Baik.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus silakan, Pokok Permohonannya!

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Pokok Permohonan. Bahwa penetapan hasil pemilihan suara oleh Termohon, suara sebagaimana terlampir dalam tabel.

Yang pertama, H. Tonny Junus sebagai Pemohon dan H. Daryatno Gobel=57.788.

Nomor 2, Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto=93.196.

Nomor 3, Chamdi Ali Tumenggung Masang dan Tomy Ishak=14.785.

Dan Nomor 4, Dr. Rustam H. S. Akili, S.E., S.H., MH. dan Dicky Gobel, S.E=64.667.

Bahwa menurut Pemohon, keberatan atau Permohonan keberatan ini adalah karena tidak dilakukannya tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu terkait pendiskualifikasian Pasangan Calon Nomor Urut 2 akibat melanggar Pasal 71, dimana Pemohon Nomor Urut 2 ... apa ... Paslon Nomor Urut 2 itu dianggap melanggar untuk melakukan ... apa ... ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang, yaitu menggunakan kewenangan enam bulan sebelum penetapan calon dan KPU melakukan tindak lanjutnya dengan mengulangi proses pemeriksaan dan lain sebagainya, penelitian dan sebagainya. Padahal, dalam satu lembaga yang setara sebagai suatu penyelenggara dari satu penyelenggara pengawas, dan ketentuan undang-undang mewajibkan sebenarnya Bawaslu ... apa ... KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Pihak Terkait dianggap melanggar Pasal 71 itu tadi?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Sudah dilaporkan ke Bawaslu.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu sudah rekomendasi?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Sudah ada rekomendasi. Kemudian, dibalas oleh KPU bahwa rekomendasinya ditindaklanjuti oleh pihak KPU dengan cara melakukan proses pemanggilan saksi Pemohon dan lain sebagainya. Dan putusan KPU-nya menyatakan sebaliknya dari putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa Paslon Nomor Urut 2 sebagai Calon Pihak Terkait itu tidak melanggar ketentuan Pasal 71.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu dalil yang pertama. Kemudian, yang kedua?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Yang kedua, tentu keterlibatan atau menggerakkan ASN dalam (...)

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa Pihak Terkait bisa menggerakkan ASN? Karena dia incumbent?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Dia adalah incumbent.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi ada dugaan pelanggaran yang melibatkan ASN?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Dugaan melibatkan ASN dengan cara membentuk Timdes Pilkada Kabupaten Gorontalo yang diketuai menurut dokumen yang ada dan kami serahkan di dalam alat bukti adalah sekda.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu P berapa? Anda mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10, ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Ya, ini kebetulan (...)

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada bukti tambahan?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Ada bukti tambahan, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti begini, sebetulnya pagi ini bisa diserahkan lebih dulu, tadi saya belum mengingatkan.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini bukti-bukti bisa diserahkan sekarang, sehingga sudah masuk ke sini, bisa kita verifikasi. Sehingga nanti pada akhir persidangan, bisa disahkan, ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Izin, Yang Mulia? Apakah (...)

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan dilanjutkan!

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Oh, lanjutkan, baik.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti bukti-bukti tambahan bisa diminta sekarang. Satu orang saja, jangan mengganggu yang lain biar anu ... diserahkan. Untuk yang lain diserahkan sekaligus, diminta kalau ada bukti tambahan. Silakan sambil dilanjutkan!

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik, Yang Mulia. Jadi, sekda sebagai ketua timdes pilkada. Dan kemudian, sekda setelah ditunjuk sebagai timdes pilkada, melahirkan juga satu SK untuk menempatkan para kepala-kepala dinas atau OPD di daerah tersebut untuk kemudian bertugas memantau dalam tanda petik itu, "desa-desa" yang menjadi dampingan para kepala dinas tersebut, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Jadi, ya, tentu hal ini sangat ... apa ... padahal tugas itu adalah tugas untuk proses pelaksanaan pilkada supaya lancar dan ini, sudah ditugaskan oleh negara terhadap KPU dan Bawaslu.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada lagi dalilnya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik. itu yang kedua.

Yang ketiga, ada kepala desa yang katakanlah menyalahgunakan kewenangannya karena dia ikut terlibat menjadi (...)

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kepala desa yang memihak, begitu?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Ya, memihak dan secara langsung memang memberikan ajakan dan juga memberikan barang berupa stiker yang itu adalah juga punya petahana (...)

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu contohnya, perbuatannya. Tapi kepala desa memihak, apa lagi? Ada lagi?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Ada keterlibatan ASN (...)

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi sudah ASN.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

ASN spesifik, dimana dengan alasan memberikan uang, Yang Mulia, kepada warga di sana pada tanggal 9 Desember, hari H pemilihan (...)

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini dilaporkan ke panitia pengawas, enggak, di tingkat TPS atau di tingkat desa, dilaporkan enggak?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Dilaporkan dan bahkan ditemukan oleh panwas ... panwascam gitu, ya.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prosesnya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Dan memang (...)

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diproses panwas, dilaporkan sampai ke Bawaslu? Atau kemudian sampai ke ... ini kan menyangkut money politics?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Di Bawaslu, tapi memang hasil (...)

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada sampai ke Gakkumdu?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Tidak, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Karena menurut kajiannya tidak terbukti, tetapi tentu karena sebagai ASN dan jadi kepala desa sekaligus ... eh, mohon maaf, ini ASN dia melanggar ketentuan awal undang-undang ASN (...)

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi dua kan itu? Untuk perbuatannya money politics bisa dilaporkan di Gakkumdu, untuk keterlibatan ASN-nya, ada enggak sanksi keterlibatan ANS ... ASN yang memihak secara administratif?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Secara ini belum, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Tetapi sudah direkomendasi dari Bawaslu untuk diserahkan ke KASN itu.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, ada lagi?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Cukup, Yang Mulia. Petitem.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Petitemnya, silakan dibacakan!

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.2.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.38 WITA untuk seluruhnya.
3. Mendiskua ... mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. dan Hendra S. Hemeto S.T. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan hanya mengikutsertakan:
 - 1) H. Tony S. Junus dan H. Daryatno Gobel.
 - 3) Chamdi Ali Tumenggung Mayang dan Tomy Ishak.
 - 4) Dr. Rustam H. S. Akili, S.E., S.H., M.H. dan Dicky Gobel, S.E. Paling lambat 30 hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.
5. Memerintahkan kepada KP ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Ridwan Darmawan, S.H., Rauf Abdul Aziz.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Terima kasih, Kuasa Pemohon Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021.

Prof. Saldi, ada? Silakan! Atau Yang Mulia Pak Manahan, ada? Yang Mulia Pak Manahan, silakan dulu kalau begitu!

166. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Pemohon, dalam Permohonan halaman 15 poin 26 ini, ada di sana menyinggung tentang pengaduan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo, telah melaporkan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), ya. Ini bagaimana hasilnya

ini ... pengaduan ini dan bagaimana proses selanjutnya? Apakah ada tindakan lain dari DKPP mengenai pengaduan ini? Coba, dijelaskan! Karena ini hanya menerangkan seperti itu saja.

Terima kasih.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bahwa atas laporan ini dan juga sebenarnya ada laporan data DKPP dari masyarakat juga di sana. Sudah keluar Putusan DKPP Nomor 168-169-PKE-DKPP/XI/2020, tanggal 13 Januari 2021. Dan hasilnya, salah satunya menyatakan bahwa ketua dan salah satu anggota KPU melakukan pelanggaran kode etik, Yang Mulia, terhadap tidak dilakukannya rekomendasi Bawaslu a quo yang tadi disampaikan begitu, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, ada buktinya mengenai itu, ya? Ada keputusan DKPP itu yang memberhentikan atau apa tadi yang Saudara?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Memberhentikan dari jabatan ketuanya, Yang Mulia.

170. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Memberhentikan dari jabatan ketua?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ketua KPU Kabupaten Gorontalo.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Gorontalo.

174. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, kepada anggota komisionernya, ada tindakan juga dari DKPP?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Sanksi berat, Yang Mulia.

176. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sanksi berat, ya. Baik, itu ada bukti?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, terima kasih.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, Yang Mulia? Prof. Saldi, silakan! Cukup?

Baik, terima kasih, Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021.

Sekarang perkara berikutnya, Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan, Prinsipal! Kalau nanti pendampingnya mau bantu menganukan berkas, silakan, ya! Anda berdiri saja bisa di situ. Silakan!

181. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb (...)

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan saya sampaikan begini, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi dulu. Saudara Prinsipal, mengajukan Permohonan ini kapan?

**183. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Tanggal 15 Desember 2020.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT

15 Desember, baik. Kalau ... kenapa didasarkan pada 15 Desember, Anda mengajukan Permohonan ini?

**185. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Di tambahan perbaikan tanggal 18 Desember, empat hari setelah (...)

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, kalau begitu, ini kita lihat (...)

**187. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ya.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang saya cek ke anu dulu supaya klir ini. KPU Kabupaten Bone Bolango. Tolong itu bisa dijawab dulu, ya!

189. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Siap, Yang Mulia.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kabupaten, diadakan kapan?

191. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Tanggal 15 Desember.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT

15 Desember.

193. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

2020.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu kemudian ditetapkan tanggal berapa?

195. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

15 Desember, Yang Mulia.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT

15 Desember? Pengumumannya KPU?

197. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Di hari yang sama, Yang Mulia.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di hari yang sama? Betul di hari yang sama pengumumannya?

199. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Betul, Yang Mulia.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan tanggal 16?

201. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Kita bisa dikonfirmasi langsung ke Ketua, Yang Mulia.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Coba, miknya tolong dibantu supaya ini langsung klir untuk tenggang waktu.

203. TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: ADNAN A. BERAHIM

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, kami sampaikan bahwa rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan di tanggal 15 Desember 2020. Kemudian, penetapannya juga di hari yang sama tanggal 15 Desember 2020. Dan pengumumannya, memang dilakukan pada tanggal 16, besoknya.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh. Jadi, penetapannya tanggal 15?

205. TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: ADNAN A. BERAHIM

Ya.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, pengumumannya tanggal 16?

207. TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: ADNAN A. BERAHIM

16, ya.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, betul, ya?

209. TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: ADNAN A. BERAHIM

Ya.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, dimuat di laman KPU-nya itu kapan?

211. TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: ADNAN A. BERAHIM

Ya, tanggal 16 (...)

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT

16, itu ya?

213. TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: ADNAN A. BERAHIM

Ya, tanggal 16.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, sementara itu. Ini juga nanti menyangkut ... karena sekaligus Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara 63/PHP.BUP-XIX/2021, Anda pengajuan Permohonan kapan?

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pengajuan Permohonan pertama di tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.00.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Kemudian, untuk KPU sendiri mengeluarkan SK penetapan pengumuman penetapan rekapitulasi hasil itu adalah pada ... diumumkan lewat halaman media KPU halaman webside-nya KPU pada tanggal 16 Desember 2020 (...)

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, betul tadi penetapannya tanggal 15?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ya. Akan tetapi, ada terdapat diktum di dalam putusan itu, diumumkan pada pukul 23.52 WITA di pukul ... di hari dan tanggal 15 Desember 2020. Konsensusnya adalah apabila dia diumumkan di tanggal 15, pukul (...)

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Konsensus ... siapa yang melakukan konsensus?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Bukan konsensusnya, maksudnya begini, Yang Mulia. Artinya begini, ketika dia diumumkan pada pukul 23.52 WITA di waktu tanggal 15 itu untuk dihitung seharusnya, kan tidak masuk. Karena tinggal 8 menit waktunya, jam ... harus pergantian jam.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prof. Saldi!

223. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohon maaf, Pak Ketua. Jadi, itu penghitungan harinya, itu hari, bukan jam. Jadi hari sejak, walaupun tinggal 2 menit, tinggal 4 menit, itu tetap dihitung sehari.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ya.

225. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, setelahnya tinggal 2 hari?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Kita menemukan datanya (...)

227. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, itu yang ... yang kita gunakan. Anda jangan pakai tafsir lain, ya!

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Baik.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau begitu sementara begitu dulu, nanti. Saya persilakan kembali ke Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021!

230. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Terima kasih, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Perbaikan Permohonan Anda sampaikan kapan? Tanggal?

232. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

18 Desember.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT

18. Oke, kalau begitu begini, Perbaikan Permohonan tadi Anda sudah katakan berarti ... oh, berapa? Oh, Perbaikan Permohonannya 4 Januari, ya, betul?

234. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Ya.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu, Perbaikan Permohonan sudah lewat. Yang dipakai adalah Permohonan awal. Silakan, Anda membacakan Permohonan awal!

**236. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Terima kasih, Yang Mulia. Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 595/PL02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi yang hadir. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama dr. Rusliyanto Monoarfa bersama Umar Ibrahim selaku calon bupati dan wakil bupati.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor urutnya berapa? 3, ya?

**238. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Nomor Urut 3.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**240. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Terhadap KPU Bone Bolango berkedudukan di Bone Bolango, selanjutnya sebagai Termohon.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan.

**242. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Terima kasih.
Bisa langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia?

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, langsung ke Pokok Permohonannya.

**244. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.

Nomor 1=15.039 suara. Nomor 2=43.099 suara. Nomor 3=12.856 suara. Dan Nomor 4=30.271 suara. Total suara sah adalah 101.265 suara.

Berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing calon adalah 0. Pasangan Nomor 1=0, Nomor 2=0, Nomor 3=0, Nomor 4=0.

Bahwa menurut Pemohon, keputusan KPU nomor sekian tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak sah karena terdapat kesalahan dalam jumlah perolehan suara pasangan calon. Uraianya adalah sesuai keputusan KPU nomor sekian tentang Penetapan Rekapitulasi Bupati dan Wakil Bupati. Ada Bukti P-3 dan P-31.

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT adalah 115.593. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Nomor 312, tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 (Bukti P-4).

Menurut Pemohon, jumlah pemilih dalam DPT adalah 115.591. Hal tersebut karena Pemohon melihat terdapat selisih di beberapa kecamatan yang kemudian hasil daripada DPT setiap kecamatan kita tambahkan ... kita kalikan dengan 2,5% sebagai tambahan kertas suara. Jumlah kertas suara yang diterima, termasuk cadangan pada Keputusan KPU Nomor 595 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara adalah 118.668 (...)

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, intinya begini, ya. Menurut Pemohon, dalil yang pertama bahwa jumlah suara yang didistribusikan di TPS melebihi DPT plus 2,5%, gitu, kan?

**246. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ya.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus yang kedua? Dalil kedua, apa?

**248. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Dan setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten, itu terdapat kurang-lebih 3 versi. Jadi, versi yang ditetapkan berdasarkan DPT oleh KPU dan itu pun setelah direkapitulasi berdasarkan rumus yang telah menjadi rumus baku dalam perhitungan suara, yakni jumlah suara sah, suara rusak, dan suara yang tidak dicoblos, itu berbeda dengan suara yang didistribusi. Ketika ditambahkan, itu kemudian hasilnya sesuai dengan rumus, itu keluar hasil yang sebenarnya. Namun kemudian, oleh KPU membuat angka secara manual dan itu ditetapkan ... apa namanya ... pada saat rekapitulasi. Padahal, Pihak Pemohon sudah mengingatkan kepada KPU untuk tidak tergesa-gesa memutuskan hasil rekapitulasi suara karena terdapat selisih antara jumlah suara yang didistribusi dan juga suara yang masuk pada saat hitung terakhir.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini berarti yang kedua, masalah persoalan rekapitulasi hasil pemungutan suara?

**250. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ya.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

**252. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Sehingga Pemohon ketika melakukan perhitungan terakhir, maka oleh sistem tidak bisa terbaca, sehingga error. Dan ini membuat seluruh jumlah suara dianggap nol karena sistem tidak bisa membaca. Karena rumus yang digunakan adalah sama dengan rumus yang dibuat oleh Termohon, sehingga Pemohon melakukan perhitungan dari awal berdasarkan jumlah DPT tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sekarang ketiga? Dalil yang ketiga, apa?

**254. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Kemudian, yang ketiga adalah bahwa pada saat Pemohon melakukan perhitungan jumlah suara yang telah ditetapkan, maka tidak sama dengan jumlah suara yang telah dihitung oleh KPU dan itu pun tidak sesuai dengan hasil perhitungan rumus yang terakhir, sehingga rekapitulasi terakhir daripada jumlah suara itu ada 3 versi. Sehingga sampai hari ini, kami tidak tahu mana yang digunakan oleh KPU, sehingga agak susah kita menetapkan seluruh hasil jumlah suara berdasarkan keputusan yang benar.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau menurut Saudara, yang benar yang mana? Yang tadi disebutkan pertama tadi itu?

**256. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Menurut Pemohon adalah jumlah suara yang benar adalah 118.693. Ini adalah merupakan hasil hitungan Pemohon berdasarkan data daripada Termohon (KPU), yakni setiap TPS kami tambahkan 2,5% jumlah suara, sehingga mendapatkan hasil setiap TPS kertas suara yang harusnya didistribusi. Tetapi oleh Termohon, mengeluarkan angka yang lain. Kemudian, pada saat dihitung jumlah berdasarkan Excel, itu pun tidak digunakan lagi oleh Termohon sebagai hitungan yang sebenarnya. Bahkan, Termohon membuat angka baru dengan me-delete atau mengetik secara manual angka yang seharusnya. Itu sudah ditetap ... atau sudah keluar berdasarkan rumus. Dan itu kami memiliki bukti yang telah ditandatangani oleh Termohon, Yang Mulia.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Dalil yang lain?

**258. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Dalil yang lain kepada Calon Nomor 4.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Calon Nomor 4 itu, siapa ini?

**260. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Nomor 4 adalah Pak Kilat Wartabone bersama Syamsir Kiyai.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa ... Nomor 4 kenapa melakukan (...)

**262. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Nomor 4 ini adalah calon yang didukung oleh independen.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**264. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Dan kami Paslon Nomor 3 ini didukung oleh 4 partai politik (...)

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**266. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Golkar, PPP, PAN, dan Gerindra. Kemudian, Calon Nomor 4 ini adalah diusung oleh independen. Namun, pada saat melakukan kegiatan-kegiatan kampanye, termasuk sosialisasi, itu mengklaim adalah 2 partai, yakni Partai PDIP (...)

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini tidak (...)

**268. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Dan Partai Demokrat.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak menyangkut Pihak Terkait, ya?

**270. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Tidak ... ya.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

**272. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Kemudian ... kedua partai ini kemudian di simbol-simbolnya kami memiliki bukti per ... mencetak baliho, mencetak seluruhnya, itu digunakan partai yang didukung oleh partai kami, yakni Partai Golkar (...)

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**274. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Kemudian, diklaim oleh (...)

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Anda merasa terganggu (...)

**276. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ya.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh Paslon Nomor Urut 4, yang mestinya Anda itu didukung Golkar dan PDIP, tapi Paslon Nomor 4 mengaku juga didukung oleh Golkar dan PDIP (...)

**278. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ya.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gitu?

**280. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ya. Hanya Golkar (...)

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sesuai yang di dalil Anda ?

**282. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ya.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, apa yang dimaksud? Begini, Anda merasa dirugikan? Lah, kalau dirugikan, itu kan mestinya enggak ke Termohon atau enggak ke Pihak Terkait. Yang merugikan Anda, kan ... mestinya bagaimana? Ini ... ini dimasukkan sebagai dalil, itu untuk melaku ... siapa yang melakukan pelanggaran ini? Kan Pasangan Nomor Urut 4, kan?

**284. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ini kami sampaikan ini ke KPU dan Bawaslu, kemudian tidak ditindaklanjuti. Bahkan pada saat kami melaporkan, sampai hari ini belum ada keputusan mengenai adanya (...)

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh. Jadi, Anda juga melaporkan ini ada paslon begini, tapi Bawaslu diam saja, enggak ada masalah, begitu?

**286. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ya, ya.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU-nya juga?

**288. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ya.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, dalil yang lain?

**290. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Dalil yang lain, termasuk juga kami melaporkan mengenai Paslon Nomor 2.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh, kenapa Paslon Nomor 2?

**292. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Paslon Nomor 2 ini adalah (...)

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ada di Permohonan?

**294. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Kami sampaikan ada di Permohonan.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan awal yang dibacakan, ada itu? Di halaman berapa? Kayaknya sudah enggak ada dalilnya. Permohonan awal Anda enggak ... sudah ... dalil yang disampaikan itu tadi ... hanya itu tadi (...)

296. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Yang ... yang perbaikan, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, perbaikan, kan enggak dipakai. Sudah lewat, kok.

298. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Oh. Siap, Yang Mulia.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan perbaikannya 4 Januari. Padahal, kan 3 hari setelah Permohonan pertama, awal, ya. Berarti dalilnya hanya itu, ya? Jadi, tidak ada lagi, kan?

Terus kalau gitu, Petitumnya bagaimana, Pak dr. Rusli?

300. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Terima kasih. Untuk Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.

Kedua. Membatalkan Keputusan KPU Bone Bolango Nomor 595/PL.2.6/Kpt/7503/Kab/12/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.52 WITA.

Ketiga. Memerintahkan Termohon melaksanakan (...)

301. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang Saudara baca Petitum di Perbaikan Permohonan atau Permohonan awal?

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Petitemnya juga Petitem Permohonan awal.

303. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, kan tadi sudah ditegaskan Pak Ketua. Karena Saudara terlambat menyampaikan Perbaikan Permohonan, jauh terlambat 4 Januari, maka Perbaikan Permohonan itu sudah dianggap tidak ada. Jadi, semua basis yang Saudara sampaikan tadi dan itu juga nanti yang akan dijawab Termohon. Coba perhatikan, ya! Termohon nanti jangan bertanya lagi, Pihak Terkait, juga Bawaslu.

Basis argumentasi yang akan disusun oleh Termohon, yang akan dijelaskan oleh Bawaslu, Pihak Terkait adalah berdasarkan kepada Permohonan awal. Jadi, itu yang Saudara bacakan sekarang itu ndak ada di sini. Nah, itu ... itu klir. Supaya ini ada kepastian proses. Oke, kalau Anda menyampaikan juga, kami tidak bisamelarang, tapi itu tidak akan dipertimbangkan. Nanti biar disampaikan juga keberatannya di dalam jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, ya? Jadi, supaya tidak ada dusta di antara kita ini, ya.

304. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Siap, Prof.

305. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, tadi Anda disuruh Pak Ketua ... Pak Ketua Panel Yang Mulia Prof. Arief, untuk menyampaikan Permohonan awal karena ini yang memenuhi tenggat waktu, Perbaikan Permohonannya lewat tenggat waktu. Jadi, ini tidak dipertimbangkan lagi.

Terima kasih, Pak Ketua.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Saldi.

Jadi, ini saya bacakan saja supaya Anda tahu. Anda sudah memegang ini kan Permohonan awal? Di dalam Petitem angka 5, ini Permohonannya enggak ada halamannya.

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan, ya, Putusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 595 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi dan seterusnya, yang diumumkan pada tanggal 15 Desember Tahun 2020, pada pukul 23.52 WITA.

b. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Itu yang Petitumnya Permohonan awal. Gitu, ya?

**307. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Ya, Yang Mulia.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Ruli ... Rusliyanto, ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup, ya?

**309. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Cukup, Yang Mulia.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Sekarang berikutnya, perkara untuk Kabupaten Gorontalo. Ini Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Siap, Yang Mulia.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6 (...)

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum ... sebelumnya, saya mau tanya dahulu. Yang Anda bacakan itu Permohonan yang mana?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Permohonan perbaikan, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan. Sebentar, sekarang kita cek dahulu supaya ... biar jelas.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Tanggal (...)

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kapan Saudara menyampaikan Permohonan awal?

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Permohonan awal, 18 Desember.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT

18 Desember?

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Ya.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU menetapkan dan mengumumkan kapan menurut Saudara?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

16 Desember 2020, pukul 22.30 WITA, Yang Mulia.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Kemudian, kami mengajukan perbaikan tanggal 22 Desember 2020 pukul 22.00 WITA.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Ya. Cukup, Yang Mulia.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Baik, terima kasih. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Kami, dalam hal ini mewakili sebagai Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dengan Nomor Urut 4, atas nama Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H. dan Dicky Gobel, S.E.

Adapun Permohonannya untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Kemudian, Kedudukan Pemohon, dianggap dibacakan.

Kemudian, Tenggang Waktu Pengajuan, tadi sudah kami jelaskan, Yang Mulia.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Kemudian, mengenai Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara (...)

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begini sebelumnya.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Ya. Izin, Yang Mulia.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu mengenai perolehan suara, kenapa Anda ... Anda kan tidak memenuhi Pasal 158? Selisihnya 12,38%, kenapa Anda mengajukan Permohonan? Alasannya?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Baik, Yang Mulia. Ada 3 dalil yang kami ajukan, Yang Mulia. Pertama, tadi hampir sama dengan yang sebelumnya, ada diskualifikasi yang diputuskan oleh ... direkomendasikan oleh Bawaslu dan (...)

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4?

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Siap, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tapi pasangan yang (...)

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Pasangan Nomor Urut 2, maaf, Pasangan Nomor Urut 2.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Pasangan Nomor Urut 2?

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Ya.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Tapi itu tidak dilakukan oleh KPU.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU.

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Kemudian (...)

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga ada persoalan itu?

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Ya. Kemudian, ada persoalan itu (...)

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, dalilnya pokok Permohonan yang lain?

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Kemudian, pokok Permohonan yang lain mengenai adanya pelanggaran TSM, Yang Mulia.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pelanggaran TSM.

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Di (...)

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa saja itu TSM pelanggarannya?

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Di poin 4.10. Bahwa petahana melibatkan ASN melalui pembentukan timdes pilkada.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Kemudian, petahana melibatkan kepala desa untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Kemudian, pelanggaran petahana dilakukan dengan perencanaan sedemikian rupa, sehingga kepala desa benar-benar dijadikan mesin pemenang Paslon Nomor Urut 2.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Dan seterusnya.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Kemudian, ada dalil ketiga mengenai penggelembungan suara, Yang Mulia.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Caranya gimana penggelembungan suaranya itu?

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Mungkin Pak Salahudin bisa melanjutkan.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Rekan kami, Yang Mulia.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba maju ... atau miknya tolong dibantu, supaya masuk direkam!

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Saya sedikit menambahkan. Tadi, Yang Mulia, kebetulan pada saat waktu rekapitulasi pengumuman hasil oleh KPU itu pada tanggal 16, pukul 22.36, hari Rabu.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Kami mengajukan Permohonan pertama, yaitu pada tanggal 18, hari Jumat (...)

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pukul 21.18 itu, kan?

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya. Kami mengajukan perbaikan pada hari terakhir (...)

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Selasa.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Selasa.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT

22 Desember?

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

22.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah.

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya, baik. Untuk persoalan yang disampaikan oleh rekan kami tentang penggelembungan suara. Setelah kami (...)

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, istilah yang tepat itu bukan penggelembungan suara.

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Bukan penggelembungan suara, Yang Mulia.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu penambahan suara. Kalau gelembung, itu balon.

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya, bukan penggelembungan suara, Yang Mulia. Kami melihat dari sisi DPT, Yang Mulia.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Dari DPT itu, dari beberapa item yang kami uraikan (...)

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa ... di DPT-nya kenapa itu?

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Di DPT itu, Yang Mulia, pertama awal bahwa Pemohon menemukan beberapa TPS yang ada di kabupaten (...)

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda menyebut di sini ada di 19 TPS, ya?

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TPS di 19 kecamatan, begitu?

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Di ... bukan di TPS ... bukan di 19 kecamatan. Jadi, di TPS ini kami urai dari awal, Yang Mulia. Di nomor urut 38. Di 38 di situ, di situ mulai kami uraikan. Bahwa ada contoh di TPS 1 Kayu Merah, Kecamatan Limboto terdapat pemilih ganda dalam DPT, yaitu yang sama namanya atas nama Ari Mochtar Polapa (...)

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini pemilih ganda?

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya, pemilih ganda. Nama yang sama, Yang Mulia, tetapi di dalam DPT tersebut ada dua nomor urut DPT. Yang satu, di nomor urut 171. Dan yang satu, di nomor urut 397. Nah (...)

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini NIK-nya sama, namanya sama?

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

NIK-nya sama. Jadi ada beberapa, ada lima poin di sini, Yang Mulia, yang kami uraikan dengan alat bukti yang kami susun. Yang pertama itu, yaitu ada nama sama, marga sama, tanggal lahir sama, bulan lahir sama, tahun lahir sama.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi NIK-nya sama atau tidak?

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

NIK-nya sama.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama?

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya, yang kedua (...)

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apakah dua itu dipakai untuk coblos semuanya, enggak?

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Dari total yang kami lihat, Yang Mulia. Dari total pengguna hak pilih dibandingkan dengan DPT yang ini, maka kami menemukan kesimpulan ada sekitar 58.000 sekian yang DPT yang nama sama, NIK sama, NIK eror, KK sama. Itu yang terurai, Yang Mulia, yang kami urai.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu begitu. Tapi, apakah ... ini contoh tadi yang Anda sampaikan. Ada di satu TPS, ya, ada orang yang NIK-nya sama, namanya sama tercantum di urutan 171. Terus, dia juga tercantum di DPT dengan nomor 391.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apakah orang yang sama ini, dua ini, 171 dan 391 juga menggunakan hak pilihnya dua-duanya? Atau hanya yang 171 yang digunakan, yang 391 tidak digunakan?

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Baik. Izin, Yang Mulia. Minta izin untuk menjelaskan.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Baik, jadi begini (...)

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan terlalu banyak izin, nanti kalau terlalu banyak izin, izin saya habis, nanti yang siang sudah habis.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Begini, jadi begini, Yang Mulia. DPT Kabupaten Gorontalo itu hasil DPT yang ditetapkan oleh KPU=283.848. Kenapa kami mengatakan bahwa ada beberapa banyak (...)

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini yang saya tanya itu tadi, yang dijawab pertanyaannya ada di satu TPS NIK-nya sama, nama orangnya itu sama, mereka atau satu orang ini masuk dalam urutan nomor 171 dan 391. Sekarang, 171 itu dipakai untuk memilih atau juga memilih dengan menggunakan nomor 391. Itu Anda tahu, enggak?

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ini nama yang kami temukan di dalam DPT yang (...)

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi kalau nama di DPT begitu, tapi hanya digunakan di satu nomor saja, berarti kan bukan pemilih ganda?

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Baik. Ada di satu kecamatan yang terurai di dalamnya, Yang Mulia. Nama yang sama di dalam DPT yang sama juga yang berbeda antara TPS satu dengan TPS lain, nama yang sama dia menggunakan hak pilih.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Memilih di TPS ini, memilih di TPS sana?

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya. Kami mengajukan nanti saksi, Yang Mulia. Dia menggunakan dua kali hak pilih, namanya sama. Jadi peristiwanya begini, Yang Mulia, ada nama yang (...)

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang begini, contoh ini supaya bisa menjadi contoh kasus. Itu di TPS mana?

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Yang mana, Yang Mulia?

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu tadi, dia terdaftar di dua DPT, dia menggunakan hak pilihnya di dua DPT?

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang itu di TPS mana?

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Di TPS Limboto, Hutuo, Yang Mulia.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti itu tolong KPU di ... anu ... itu. Satu, di TPS mana?

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Di TPS Hutuo, Limboto, Yang Mulia.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TPS berapa itu?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ada di dalam uraian, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada, ya, diuraian di situ ada, ya?

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya, Yang Mulia.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, satunya di TPS mana?

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Kenapa, Yang Mulia?

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satunya di TPS mana?

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Di Limboto juga, Yang Mulia, di Hunggaluwa.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu di TPS berapa?

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

1 dan 9, Yang Mulia.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT

1 dan 9?

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Desa Limboto?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Kecamatan Limboto, Yang Mulia.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kecamatan Limboto, desanya desa apa?

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Hepuhulawa, Yang Mulia.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi di (...)

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Kelurahan Hepuhulawa, di TPS 1 dan TPS 9.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TPS 1 dan TPS 9?

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

TPS 9.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atas nama siapa kalau tahu itu? Ini karena sudah peristiwa konkret dan detail, harus bisa dibuktikan, nanti KPU juga mereaksi.

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ali Mochtar. Ya, benar nama Ali Mochtar Polapa, Yang Mulia.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau begitu, terus dalil yang berikutnya, apa?

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Terus berikutnya, Yang Mulia. Yang berikutnya tentang di TPS 7 Hutuo. Pemilih menggunakan (...)

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, di beberapa TPS ada pilih ganda. Yang sekarang, apa ini?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya, di TPS 7 Hutuo, Termohon membiarkan seorang pemilih yang menggunakan ... menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan biodata.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menggunakan?

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Biodata, Yang Mulia.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Biodata?

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Biodata (...)

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya. Tidak terdaftar di dalam DPT, namanya tidak masuk dalam DPTb, tetapi yang bersangkutan dibiarkan oleh pemilih ... oleh Termohon untuk menggunakan hak pilih dengan menggunakan biodata ... kartu biodata.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Biodata?

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya, biodata, Yang Mulia, biodata. Sementara, kan di dalam peraturan bahwa menggunakan KTP elektronik. Tapi (...)

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi kan begini. Dia mendapat undangan melalui Formulir C-6. Kalau dia tidak punya Formulir C-6, boleh datang di TPS-nya dengan menggunakan KTP elektronik, kan begitu? Tapi namanya harus ada di dalam DPT di situ dan TPS-nya adalah TPS di mana dia berdomisili, kan begitu, kan?

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ini biodata itu, apa?

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Biodata itu hanya kartu. Kartu, Yang Mulia. Yang menuliskan Namanya, tetapi yang bersangkutan bukan penduduk di TPS atau desa tersebut (...)

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini nanti coba itu direaksi, bagaimana? Ya, terus dalilnya?

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Nah, kami sudah coba dari tingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan, oleh Termohon tidak ditindaklanjuti sampai di tingkat rekapitulasi tingkat kabupaten pun dan (...)

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, mestinya kayak gitu rekapitulasi penghitungan suara di TPS dulu. Kalau sudah di tingkat kecamatan, sudah jauh sekali, sudah ribuan.

Itu mestinya bisa diselesaikan di tingkat TPS dulu, di tingkat TPS itu baru bisa menyelesaikan 300. Di sini sebetulnya sudah ketahuan di sini, tidak di kecamatan, apalagi sudah sampai ke kabupaten, apalagi kemudian saksi Saudara itu sudah menandatangani di tingkat TPS. Kalau saksi Saudara dan semua saksi yang di situ sudah tanda tangan, berarti di situ sudah klir, gitu.

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Izin, Yang Mulia. Saksi kami di tingkat TPS tidak menandatangani. Nah, pada saat waktu di (...)

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di mana? Tidak ... TPS tidak tanda tangan, itu dimana?

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Di TPS 7 Hutuo.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang nanti coba direaksi, itu betul di TPS ... TPS berapa?

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

TPS 7 Hutuo, Limboto, Yang Mulia.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti direaksi. Baik, terus!

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Kemudian, kami tindaklanjuti sampai di tingkat kecamatan dan kabupaten (...)

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, sudah betul.

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Kami sudah melaporkan kepada Bawaslu.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, itu ... dalil itu sudah. Terus!

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Nah, dari dalil yang kami sampaikan tadi, dari beberapa ini, kami menemukan di dalam proses rekapitulasi DPT itu, Yang Mulia.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini begini (...)

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau kecil-kecil berdalil begini disampaikan seluruh uraiannya, enggak sampai ini. Sekarang dalil yang itu tadi sudah?

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada persoalan-persoalan pemilih ganda, persoalan-persoalan orang yang tidak berhak memilih, sudah?

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Uraianya ada di Permohonan Saudara. Terus, dalil yang lain lagi?

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya, saya ambil kesimpulan sedikit dengan dalil itu, Yang Mulia. Minta izin sekali lagi. Jadi, kesimpulan kami di dalam kenapa adanya DPT ganda yang terjadi di Kabupaten Gorontalo yang kami temukan begitu banyak. Pada intinya, kami menemukan bahwa Termohon pada saat melakukan pemutakhiran data tidak menggunakan DP-4.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah. Itu nanti persoalan itu nanti kan lebih anu. Sudah, dalil yang lain lagi, apa? Sudah cukup dalil yang lain? Ini kalau kita lihat memang dalilnya berkenaan dengan itu yang terakhir.

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Cukup, Yang Mulia.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah selesai dalilnya. Ada lagi? Sudah enggak ada, kan?

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Cukup, Yang Mulia. Cukup.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sekarang Petitumnya, silakan!

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan mengenai Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 750 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

Nomor Urut 1, nama Pasangan Calon Tonny Junus dan Daryatno Gobel, S.I.P., perolehan suara 57.788 suara. Nomor Urut 2, Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo ... Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. dan Hendra Hemeto, S.T, perolehan suara 0. Nomor Urut 3, Chamdi Mayang, S.E., M.Si dan Tomy Ishak, S.I.P., M.Si., perolehan suara 14.785 suara. Nomor Urat 4, Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H. dan Dicky Gobel, S.E., perolehan suara 64.667 suara, sehigga total suara sah 137.240 suara.

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini, atau:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 750 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, sepanjang di TPS-TPS. Ada 31 TPS, Yang Mulia.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Dan seterusnya. Kemudian (...)

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sesuai dengan itu yang Anda bacakan.

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Ya, baik. Kemudian, ketiga. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di sepanjang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan di dalam Petikum ini, dan seterusnya.

- 4) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Prof. Saldi, ada?

494. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya mau dapat penjelasan sedikit saja. Ini di Permohonan Saudara itu halaman 26 sampai 78 itu, kan ada angka-angka. Lalu di atasnya disebut row labels, di sebelahnya ada counts of TPS number. Bisa ndak Anda jelaskan, apa maksudnya ini? Karena ini ada nama orang di bawahnya, banyak sekali ini sampai halaman 78. Apa yang dimaksud row labels dan counts of TPS number di sini? Singkat saja!

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tolong miknya kalau yang lagi bicara di sebelah mana, miknya berada di dekat yang sedang bicara, jangan digeser ke yang jauh. Kalau KPU, kan belum bicara. Jadi, jangan ditempatkan di sana, dekat sini supaya enggak waktunya lama. Silakan!

496. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 26 sampai halaman 78, Anda lihat 26 saja karena begitu semuanya!

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

498. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ini yang kami urai di sini tentang penjelasan ini, ini ada nama-nama yang sama dengan yang saya sebutkan dari awal tadi, Yang Mulia.

500. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini nama-nama yang ... jadi, dalam row labels ini, nama-nama yang sama?

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya. Nama-nama yang sama (...)

502. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kalau counts of TPS number?

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ini TPS ... nomor TPS-TPS-nya.

504. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor TPS-nya 2 semua?

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Bukan, Yang Mulia. Ini nomor TPS ini. Ini kemarin dalam kode NIK. Kami melihat di sini bahwa TPS-TPS ini bukan ... ini hanya nomor kode kami, Yang Mulia.

506. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau Anda ... kode Anda saja, bagaimana kami mau mengerti?

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Tidak. Jadi begini, Yang Mulia. Ada panjang label itu, Yang Mulia. Sehingga, bersangkutan paut dengan alat bukti kami, Yang Mulia.

508. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Bersangkut paut dengan alat bukti kami. Memang kalau kami menjelaskan di dalam Permohonan, Yang Mulia, ini kan akan memakan banyak halaman. Sehingga, kami uraikan di dalam bukti kami, Yang Mulia. Alat bukti kami, Yang Mulia.

510. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Saya supaya klir dan supaya diketahui orang. Itu begini, ini agak makan waktu sedikit ini. Anda mengatakan bahwa di DPT itu dobel namanya, gitu, kan? Betul?

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Namanya di DPT dobel. Sekarang yang dobel itu, apakah dua-duanya menggunakan hak suaranya? Saya tanya!

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Jadi begini, Yang Mulia.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, enggak usah, "Jadi." Menggunakan atau tidak?

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Kami menggunakan, kami temukan dengan kenyataan yang kami akan hadirkan saksinya. Seperti contoh (...)

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, nanti dulu, belum sampai ke saksi. Sekarang begini, di dalam Anda mendalilkan, itu ada DPT dobel?

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya, Yang Mulia.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Anda di dalam Permohonan, menemukan enggak yang DPT dobel itu orangnya melakukan pencoblosan? Ada, enggak?

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Baik, Yang Mulia. Dari keseluruhan DPT yang keluar, kami menghitung rekapitulasi hasil pengguna suara yang sah.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu asumsi.

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Pengguna ... ya.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar! Itu asumsi.

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang orang yang menggunakan dobel memilih, itu memilih siapa?

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Kami tidak melihat dia memilih siapa, Yang Mulia. Cuma salah satu contoh, ada dua orang yang mengatakan dia nama yang sama (...)

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begini loh, ya.

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kalau itu dihadirkan, ternyata dia memilih dua kali, ada risiko dia dipidana, loh.

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya, Yang Mulia.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Risikonya ... ya, sudah berhenti di situ. Jadi begini, rumusnya, DPT dobel, dia menggunakan dua-duanya atau tidak? Terus kemudian, memilih siapa? Apakah milih Pihak Terkait atau malah memilih Saudara? Nah, kalau malah itu memilih Saudara, kan sebetulnya yang diuntungkan malah Saudara kalau perhitungan suara?

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Tidak memilih kami, Yang Mulia.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, enggak. Belum tentu, loh Anda kan tidak tahu, tidak memilih Anda, dari mana? Padahal, memilih itu rahasia?

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ada pengakuan jujur, Yang Mulia.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pengakuan jujur, siapa yang jujur? Ya, kan? Jadi, itu ada rumus cara menghitung, ya? Sudah, sekarang sudah selesai supaya diketahui seluruhnya. Itu cara merumus menghitungnya begitu.

Silakan, Yang Mulia!

538. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Kuasa Pemohon ini, ya? Memang tadi dalam Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 karena sama-sama Kabupaten Gorontalo ini, ya? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya bahwa ada pengaduan. Apakah juga Kuasa Pemohon ini ... saya ulangi, Prinsipal Pemohon ini juga mengajukan Pihak Termohon, dalam hal ini KPU, untuk hal-hal yang dilakukan oleh Pihak Termohon, sehingga adanya Putusan DKPP Nomor 168-169 ini yang keluar? Apakah juga itu menjadi termasuk materi yang diadukan kepada Pihak Termohon, sehingga ini ada putusan dari DKPP ini? Atau juga Pemohon ini tidak ... malah tidak ikut mengadu, seperti itu? Tolong dijelaskan!

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Permohonan kami juga, kami menyampaikan Permohonan bahwa adanya laporan tentang terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (3) yang dilakukan oleh petahana atau Nomor Urut 2. Dan hal tersebut, sudah diproses oleh penyelenggara juga, yaitu Bawaslu. Nah, Bawaslu melakukan proses dan mengeluarkan rekomendasi bahwa tidak

memenuhi syaratnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jangka waktu 7 hari ditindaklanjuti oleh Termohon dan Termohon membuat kajian tersendiri yang menyatakan bahwa Pasangan Nomor Urut 2 tetap memenuhi syarat. Dan kemudian ditindaklanjuti laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dan hasil akhir atau keputusan dari DKPP di dalam pertimbangannya yang kami juga sempat ajukan bukti, Yang Mulia, dalam pertimbangannya dengan tidak melaksanakan rekomendasi dan uraian (...)

540. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi ... jadi, termasuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu itu, ya?

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Rekomendasi Bawaslu.

542. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu yang intinya, ya?

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ya.

544. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sehingga ada keputusan DKPP, ya.

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Sehingga, DKPP memutuskan memberhentikan ketua KPU dari jabatannya sebagai ketua KPU dan memberikan teguran keras kepada kelima anggota.

546. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Dan ini juga, Yang Mulia, kami ingin tanyakan pada hari ini. Ada Termohon yang hadir (...)

548. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu nanti.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, enggak bisa, itu enggak bisa tanya! Kok tanya di sini? Enggak ada forum tanya itu!

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Ini, Yang Mulia.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mau tanya kepada siapa?

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Formalitas Kuasa, Yang Mulia. Karena (...)

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, itu nanti kita yang tanya.

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

556. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, yang penting bahwa (...)

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan Saudara yang menanyakan, yang menanyakan kita. Apakah dia berhak di situ atau tidak? Nanti kita yang cek.

558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: SALAHUDIN PAKAYA

Siap, Yang Mulia.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

560. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah. Terima kasih untuk Pemohon Gorontalo yang Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021.

Sekarang terakhir, Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bone Bolango. Yang pertama, yang saya perlu minta klarifikasi, kapan Permohonan awal Anda sampaikan?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Permohonan awal disampaikan di tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.00, Yang Mulia.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Perbaikan Permohonannya?

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Perbaikan Permohonan dimasukkan secara offline lewat Kepaniteraan nanti di tanggal 4 Januari 2021.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu, Perbaikan Permohonan sudah lewat, ya?

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Baik, Yang Mulia.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu yang dipakai adalah Permohonan awal yang dibacakan.

Silakan, membacakan Permohonan awal!

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Identitas Pemohon, Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi. Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020.

Terkait dengan dalil Permohonannya. Yang pertama (...)

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cepat!

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan seterusnya berdasarkan SK KPU Nomor 170/PL dan seterusnya Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda nomor urut berapa itu?

571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Nomor Urut 4.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 4, baik. Terus? Kewenangan Mahkamah sudah, dianggap dibacakan.

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Dianggap dibacakan Kewenangan, Tenggang Waktu dan seterusnya. Kita langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Pokok Permohonannya apa dalil-dalilnya?

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.

Pasangan Nomor Urut 1=15.039, Pasangan Nomor Urut 2=43.099 suara, Pasangan Nomor Urut 3=12.856 suara, Pasangan Nomor Urut 4=30.271 suara. Total suara sah=101.265 suara.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dalil yang utama apa? Anda mengatakan apa?

577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Yang paling utama dalam Permohonan ini adalah adanya tindakan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon (...)

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Yang menguntungkan pasangan calon Pihak Terkait sendiri (...)

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Termasuk di dalamnya adalah sampai terjadinya penetapan tersangka terhadap kepala desa.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Atas nama Hartian Sutoyo Kono (...)

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang pertama, yang pokok Anda mengatakan bahwa KPU salah menetapkan calon. Itu, kan?

585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ya. Benar, Yang Mulia.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena calon ... apa ... Pihak Terkait yang menang itu dianggap sudah 2 kali?

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ya.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, Anda baca enggak pengumuman ... anu ... putusan KPU mengenai Permohonan itu? KPU baca, enggak? Baca, ya?

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ada.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nanti coba itu dijadikan ... anu ... terus kemudian, pelanggaran yang lain, apa?

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Yang paling urgent itu adalah terkait periodisasi tadi, Yang Mulia.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Periodisasi sudah.

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ya.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi (...)

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Yang kedua tentang (...)

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah ada putusan MK yang mengatakan bagaimana itu?

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ya.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan? Ya. Terus, yang kedua, dalilnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh siapa dan sudah dilaporkan oleh Bawaslu, tapi tidak ditindaklanjuti. Itu, kan, begitu?

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ya.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa itu ... pelanggarannya apa? Di mana?

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Yang pertama, terkait pelanggaran administrasi pemilu, Yang Mulia.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa itu ... pelanggaran administrasi pemilu apa itu?

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Itu dilakukan oleh Termohon, akan tetapi oleh Bawaslu tidak di (...)

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tindak lanjuti?

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Tindak lanjuti.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, nanti Bawaslu merespons itu. Ya, terus, apa lagi?

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Yang kedua, tadi yang saya sebutkan ada kepala desa yang (...)

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa (...)

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ya, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga di putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo terhadap terdakwa dinyatakan bersalah.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, apa lagi? Kayaknya cuma itu dalilnya?

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ya.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

2 itu saja, Yang Mulia.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Yang ketiga ... ya, itu saja (...)

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah 3, itu kan dalilnya. Tapi di dalam Permohonan Anda, sebetulnya KPU salah menetapkan pasangan calon seperti yang pertama, kan? Terus kemudian, Bawaslu tidak menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, kan, begitu?

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Baik.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sudah cukup, ya? Sekarang Petitemnya.

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh ... oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Hamim Pou dan H. Merlan Uloli sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Wakil ... Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.
4. Menetapkan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 bahwa pasangan calon ... Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan Nomor Urut 4 atas nama H. Kilat ... H. Kilat dan Syamsir sebagai yang memperoleh suara terbanyak kedua karena Pasangan Pemenang Nomor Urut 1, H. Merlan ... H. Hamim Pou, S.Kom., M.H., dan Dr. Merlan Uloli batal demi hukum.
5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan Nomor Urut 4 atas nama H. Muhammad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiyai sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Tahun 2020.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan keputusan ini

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Ada, Prof. Saldi?

621. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.
Ini untuk Kuasa, ya. Kan Anda mempersoalkan ini soal periodisasi yang Anda anggap sudah lebih dari 2 periode, ya?

622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ya.

623. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu pernah enggak mengajukan keberatan ke Bawaslu bahwa orang ini tidak memenuhi syarat?

624. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Yang pertama, terkait periodisasi ini pasca ... sebelumnya kita (...)

625. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, pertanyaan saya saja! Anda pernah mengajukan keberatan, ndak?

626. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Pernah mengajukan.

627. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ke?

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Ke Bawaslu.

629. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus, apa respons Bawaslu?

630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Bawaslu menyatakan tidak memenuhi unsur pasal yang dimaksud, Pasal 7 ayat (2) huruf n.

631. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi, Anda mengajukan keberatan, ya?

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Mengajukan keberatan.

633. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Ketua, itu saja.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, Prof? Yang Mulia, cukup?

Baik, kalau begitu, terima kasih.

Berikutnya saya akan mengesahkan bukti. Perkara nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021, Anda mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3, ya? Betul? Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021.

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Ya, Yang Mulia.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Alat bukti yang diserahkan di persidangan hari ini sedang diverifikasi, jadi belum bisa disahkan. Nanti disahkan bersamaan dengan bukti yang diajukan oleh pihak yang lain, ya?

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Siap, Yang Mulia.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, softcopy Perbaikan Permohonan dalam bentuk word board tidak dapat dibuka itu.

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Ya, Yang Mulia.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti menghubungi Kepaniteraan supaya diganti yang bisa dibuka, ya?

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Siap, Yang Mulia.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Softcopy-nya. Baik, disahkan P-1 sampai dengan P-3 sementara yang sudah (...)

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Izin, Yang Mulia. P-53, Yang Mulia.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

P-53.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-53 atau (...)

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: DUKE ARIE WIDAGDO

Oh, ya, siap.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang sudah ... tadi kan sudah saya katakan. Yang sudah masuk yang dulu itu, kan sudah diverifikasi, sudah oke, P-1 sampai dengan P-3. Sedangkan P-4 sampai dengan P-53, baru masuk sekarang, kan? Baru diverifikasi, nanti disahkan pada waktu bersamaan dengan buktinya di sana, ya? Ini yang sudah disahkan, P-1 sampai dengan P-3.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021. Pak Rusli, Anda mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-34?

649. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Ya, Yang Mulia.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ada persoalan. Bukti yang tidak dileges, hanya dibubuhi materai, tapi kan harus dicapkan dahulu itu, nanti diselesaikan.

651. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: RUSLIYANTO MONOARFA

Siap.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti-bukti tidak sesuai daftar ... dengan daftar putih. Itu nanti disesuaikan supaya daftar dengan buktinya, ya, sesuai. Bukti tidak diberi tanda. Jadi, ada harus dikasih 'kuping-kuping' ini mestinya harus ditolak, tapi nanti coba setelah selesai nanti biar dianukan.

**653. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Siap, siap.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sementara yang sudah selesai, P-1 sampai dengan P-34, disahkan.

KETUK PALU 3X

Ada beberapa catatan nanti yang harus diselesaikan.

**655. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021:
RUSLIYANTO MONOARFA**

Terima kasih, Yang Mulia.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Perkara 63/PHP.BUP-XIX/2021, mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-20?

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Siap, Yang Mulia.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul?

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021: FRENGKI ULOLI

Betul, Yang Mulia.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Sudah semua ini buktinya? Yang Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021?

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-1 sampai dengan P-14?

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Betul.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semuanya sudah benar. Daftar alat bukti sesuai dengan alat bukti fisiknya, ya, P-1 sampai dengan P-14. Tidak ada bukti tambahan?

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Cukup.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, ya? Disahkan P-1 sampai dengan P-14.

KETUK PALU 1X

Sekarang saya menetapkan untuk menjadi Pihak Terkait. Pada Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021, Prof. Dr. Ir. Nelson dan pasangannya ditetapkan sebagai Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Gorontalo. Begitu juga untuk Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021, ya, Prof. Dr. Ir. Nelson dan pasangannya.

Untuk Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021, Saudara Hamim Pou dan pasangannya ditetapkan untuk Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021, ya.

KETUK PALU 1X

Menjadi Pihak Terkait. Sehingga pada persidangan yang akan datang, sudah bisa masuk di dalam ruang persidangan.

Kemudian, kapan sidang lagi diadakan penundaannya? Untuk Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 itu hari Rabu, 3 Februari 2021, pada pukul 08.00 WIB. Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021, saya ulangi, Rabu, 3 Februari 2021, pada pukul 08.00 WIB.

Kemudian, para ... Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 hari Rabu, 3 Februari 2021, juga pada pukul 08.00 WIB, Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021.

Kemudian, Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021 hari Rabu, 3 Februari 2021, pada pukul 11.00 WIB.

Kemudian, Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 hari Rabu, 3 Februari 2021, pada pukul 11.00 WIB, ya?

Tidak ada undangan tertulis lagi. Pengumuman ini atau penyampaian ini di dalam persidangan dianggap sebagai undangan resmi, ya? Sehingga, Saudara harus sudah mengetahui dan hadir dalam persidangan untuk semua pihak saja, termasuk Pihak Terkait untuk bisa duduk di depan. Agendanya, satu, mendengarkan jawaban Termohon, mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait, dan mendengarkan keterangan Bawaslu, ya.

Kemudian, nanti diikuti pengesahan alat bukti dari Pemohon yang belum disahkan serta pengesahan alat bukti dari Saudara-Saudara yang akan menyampaikan keterangan dan jawabannya. Kalau ada bukti yang banyak, misalnya di container dan sebagainya karena semua materi harus disterilisasi, maka bisa 1 hari disampaikan dahulu di Kepaniteraan, tetapi dalam hari kerja, Sabtu dan Minggu tidak, ya. Nah, tapi untuk bukti-bukti yang tambahan, yang jumlahnya sedikit, ya, bisa disampaikan di dalam persidangan, tetapi harus melalui sterilisasi bahan-bahannya dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita bersama dan protokol kesehatan.

Ya, baik. Ada yang akan disampaikan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, Prof. Saldi, masih ada? Enggak ada. Prof., cukup?

Baik, sidang selesai (...)

667. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Izin, Yang Mulia, dari Termohon.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ini sudah begini, bagaimana?

669. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Sedikit, Prof.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begini terus, kan capai saya.

671. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Siap, sedikit, Yang Mulia.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gimana?

673. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Mengonfirmasi saja, Yang Mulia. Untuk Surat Kuasa dari Termohon itu dimasukkan kapan, Yang?

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang kalau ... anu ... Surat Kuasanya supaya dimasukkan dulu.

675. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ada, Yang Mulia.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada?

677. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ada.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang diminta, Mas, tolong! Nanti akan kita cek. Tadi ada yang mempersoalkan Surat Kuasanya.

679. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD

Ya (...)

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti setelah dimasukkan, nanti kita kita akan cek. Tadi Anda akan mempersoalkan apa sebetulnya Surat Kuasa tadi? Bahwa yang hadir di sini tidak ... mestinya tidak boleh ada Surat Kuasa, begitu. Apa bagaimana? Sehingga, ketua itu sudah tidak jabat ketua? Tidak bisa memberikan kuasa, begitu? Ya, nanti kita akan cek.

Anda sudah dapat putusan DKPP-nya? KPU ... Saudara Ketua KPU Gorontalo, ya? Itu ada surat putusan DKPP, Anda sudah tahu?

681. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: LA SAID SABIQ

Izin, Yang Mulia.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar! Biar hilang dulu ini, teman-teman ini. Jadi, menurut Termohon ... menurut Pemohon, ada surat putusan KPU yang memberhentikan Ketua KPU Gorontalo dari putusan ... putusan DKPP. Betul sudah tahu?

683. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: LA SAID SABIQ

Ya, betul, Yang Mulia.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Betul?

685. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: LA SAID SABIQ

Tapi yang di dalam Surat Kuasa kami, yang tanda tangan itu pelaksana tugas, Yang Mulia.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, klir, ya. Baik, terima kasih.

687. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: LA SAID SABIQ

Sedikit, Yang Mulia, ada tambahan tadi. Soal putusan DKPP yang ditanyakan Yang Mulia tadi, selebihnya nanti kami akan menjelaskan dalam jawaban, tapi kami akan konfirmasi. Bahwa dalam putusan DKPP itu, pemberhentian ketua itu bukan karena tidak menindaklanjuti rekomendasi. Di dalam keputusan itu, DKPP mengatakan KPU, "Sudah menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi di hukum etik karena tidak peka dan mengerti kondisi sosial." Hanya itu saja, Yang Mulia.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, nanti disampaikan dalam jawaban.

689. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021: LA SAID SABIQ

Siap, selebihnya di jawaban. Terima kasih, Yang Mulia.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB

Jakarta, 27 Januari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

